

Sumbangan Pendidikan dalam Pembangunan Demokrasi

Sadiyo

Abstract: Education is capable of constructing a consciousness and providing knowledge interms of citizen's role in a democatic society. Every learners should be given a political attitude and ability to take part in a political process. A formal setting such as school, is in charge of completing learner with an ability who is playing his funtion as a citizens in a democratic society environment. Civics material inplemented through indoctrination have to be substituted through a dialogue based on portofolio with is assured to able to provide some democatic experiences for learners at schools. A challenge blocking a democartic education in Indonesian is reformation orde to maintain birocracy and sentralization.

Kata-kata kunci: pendidikan, demokrasi, nilai-nilai demokrasi.

Runtuhnya pemerintahan otoriter Orde Baru mengakibatkan Indonesia memasuki tahap transisi menuju demokrasi. Salah satu wujud transisi menuju demokrasi adalah timbulnya pemerintahan reformasi. Dalam era reformasi dewasa ini sebagian masyarakat memiliki persepsi bahwa masyarakat demokratis diartikan sama dengan masyarakat bebas demonstrasi, yang intinya bebas memaksakan kehendak kelompoknya dengan tekanan kekerasan. Selain itu pemerintah karena ketakutan sorotan dunia internasional, cenderung membawa arus bahwa kebebasan merupakan akar demokrasi yang akan tumbuh dan berkembang secara alami sejalan dengan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah yang demokratis akan memberikan kebebasan penuh bagi para warga negara untuk menyatakan pendapatnya. Di lain pihak,

Sadiyo adalah dosen Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang.

ada yang berpendapat bahwa demokrasi bukanlah bentuk organisasi yang tumbuh secara alami, melainkan tumbuh dan berkembang sebagai hasil usaha keras dalam menggali ide-ide dengan penuh imajinasi.

Kebijaksanaan pemerintah memberikan kebebasan berpendapat kepada warga negara dalam masyarakat itu sebenarnya merupakan musuh kebebasan yang berkedok taat pada konstitusi. Demokrasi sejati memerlukan warga negara yang baik. Demokrasi tidak hanya memerlukan hukum, peraturan dan lembaga yang mampu menegakkannya, melainkan juga memerlukan sikap demokratis. Termasuk di dalamnya adalah kebesaran hati untuk mengakui kesalahannya, kesediaan untuk bekerjasama dengan kelompok lain untuk mencapai tujuan demi kesejahteraan masyarakat luas, mampu mengombinasikan semangat untuk menegakkan pendiriannya dan kompromi dengan kesadaran bahwa seseorang tidak dapat mewujudkan semua yang diinginkan, dan kombinasi antara kesadaran individu dan kesadaran kelompok.

Secara substantif, untuk mendidik warga negara yang baik guna menjamin terwujudnya masyarakat demokratis, pendidikan demokrasi mutlak diperlukan. Pendidikan demokrasi bertujuan mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis, melalui aktivitas menanamkan pengetahuan dan kesadaran tentang tiga hal. Pertama, demokrasi adalah bentuk kehidupan bermasyarakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat sendiri. Kedua, demokrasi adalah suatu learning process yang tidak dapat begitu saja meniru dari masyarakat lain. Ketiga, kelangsungan demokrasi tergantung pada keberhasilan mentransformasikan nilai-nilai demokrasi: kebebasan, persamaan dan keadilan serta loyal kepada sistem politik yang bersifat demokratis (Zamroni, 2001: 17).

Tujuan pendidikan demokratis adalah mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan berperilaku demokratis. Dalam kaitan dengan pendidikan, persoalan yang muncul adalah mungkinkah pendidikan demokrasi dilangsungkan dalam suasana sekolah yang sangat birokratis, hirarkis-sentralistis dan elitis sebagaimana sekolah yang ada dewasa ini? Keberlangsungan dan keberhasilan pendidikan demokrasi memerlukan reformasi di bidang pendidikan. Reformasi yang diperlukan adalah berkaitan dengan kebebasan akademik, kebhinekaan pendidikan, dan perombakan materi pendidikan *civics*.

Kalau para peserta didik memiliki dan dengan sadar memegang teguh nilai-nilai demokrasi, maka diharapkan mereka juga akan bertindak dan berperilaku demokratis sehingga kelak terwujud masyarakat pluralis yang demokratis. Terwujudnya generasi yang lebih demokratis, sangat tergantung pada

keberhasilan pendidikan sistem persekolahan dalam melaksanakan sosialisasi nilai-nilai demokrasi di kalangan peserta didik.

REFORMASI PENDIDIKAN

Dilaksanakannya reformasi total dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sudah menjadi komitmen politik bangsa Indonesia. Total, berarti keseluruhan bidang kehidupan dan penghidupan bangsa dan negara. Reformasi pendidikan merupakan bagian reformasi total yang dimaksud, meski seringkali masih dirasakan adanya keraguan tentang maksud dan pelaksanaannya. Perdebatan mengenai perlu dan tidaknya reformasi pendidikan untuk dilaksanakan hanya memperlambat terbentuknya *platform* reformasi yang kokoh. Hal yang diperlukan adalah bagaimana langkah-langkah reformasi tersebut harus diayunkan secara sistimatis, konstruktif, dan dinamis sehingga tujuan cepat tercapai.

Dalam hal pendidikan langkah-langkah reformasi dapat dirumuskan dalam dua bagian sekaligus masing-masing adalah langkah-langkah strategis dan langkah-langkah praktis. Dengan dilaksanakannya langkah strategis dan praktis secara simultan maka tujuan digunakannya reformasi pendidikan akan lebih mudah tercapai. Langkah strategis reformasi pendidikan nasional berisikan lima butir. *Pertama*, dilaksanakannya deregulasi pendidikan secara menyeluruh sesuai tuntutan perkembangan jaman. Dilaksanakannya deregulasi pendidikan untuk mengawali langkah strategis reformasi pendidikan kiranya sangat argumentatif. Sebagian dari regulasi pendidikan Indonesia kini memang sudah tidak sesuai dengan tuntutan jaman. Pelaksanaan pendidikan nasional yang terlalu *handayani* sekarang sudah tidak jamannya lagi dan harus diganti dengan *tut wuri handayani*, begitu juga pelaksanaan birokrasi pendidikan yang terlalu *top down* segera diimbangi dengan *bottom up*. *Kedua*, perlu diberikan kepercayaan yang lebih besar kepada masyarakat untuk berperan konkrit di dalam pendidikan. Selanjutnya pemberian kepercayaan yang lebih besar kepada masyarakat luas untuk berperan secara nyata dalam pendidikan segera direalisasi. Selama ini pengembangan pendidikan nasional lebih bertumpu pada kemampuan pemerintah. Dan pengalaman membuktikan bahwa hal ini kurang menguntungkan pendidikan nasional itu sendiri. Karena kemampuan pemerintah sangat terbatas, baik dari sisi dana maupun sumber daya manusia, maka sebagai akibatnya perkembangan pendidikan menjadi stagnan atau setidaknya kurang laju dibandingkan dengan negara-negara lain. *Ketiga*, diberikan kebebasan berkreasi dan berinisiatif

kepada seluruh civitas pendidikan. *Keempat*, perlu ditingkatkan besarnya dana pendidikan baik secara relatif maupun mutlak. Dukungan dana untuk langkah-langkah tersebut sangat diperlukan. Pemerintah, tidak hanya departemen pendidikan, harus membuka wawasan baru mengenai pendanaan pendidikan. Pendekatan klasik yang dirasa menyudutkan pendidikan nasional dari dimensi national budgeting harus segera diakhiri. Indikator-indikator klasik tentang rendahnya dana pendidikan nasional, seperti rendahnya anggaran di dalam formulasi RAPBN, harus segera diganti dengan indikator baru yang lebih konstruktif dan dinamis. Anggaran pendidikan dalam RAPBN selama ini tak pernah lebih dari lima persen terhadap nilai total maka angka ini harus dinaikkan dalam batas-batas yang lebih wajar. *Kelima*, ditekankannya pendidikan budi pekerti sebagai pengimbangan pengajaran ilmu dan teknologi oleh kader bangsa (Suprijoko, 2000: 313).

Langkah taktis juga terdiri dari lima butir. *Pertama*, dilaksanakan revisi terhadap undang-undang sistem pendidikan nasional (UU Sisdiknas), peraturan pemerintah dan peraturan teknis pendidikan. UU Sisdiknas yang umurnya genap 12 tahun memang perlu direvisi karena materinya banyak yang tidak relevan lagi, di samping penyajian materi yang tidak proporsional dan profesional. *Kedua*, diberikan bantuan akademis dan finansial bagi sekolah swasta yang nilainya disetarakan dengan sekolah negeri. Tentang bantuan akademis dan finansial bagi sekolah swasta juga perlu direformasi. *Ketiga*, diberikan kebebasan pada sekolah untuk mengembangkan kurikulum dan kreativitas. Sekolah-sekolah swasta pun sudah saatnya diberi kebebasan yang memadai untuk mengembangkan kurikulum dan kreativitasnya. Tentu saja pemerintah berhak menentukan keseragaman kurikulum secara nasional akan tetapi porsi keseragaman itu tidak boleh berlebih-lebihan. Apabila semua unsur kurikulum diseragamkan, bidang studi diseragamkan sampai materi pelajarannya diseragamkan maka dijamin kreativitas sekolah akan mati. Kreativitas guru dan manajer sekolah akan terpasung. *Keempat*, diberikan kenaikan penghasilan bagi para guru dan tenaga kependidikan yang bernilai sepadan dengan pengabdianya. Walau pun dewasa ini sudah ada sedikit perbaikan baik bagi guru negeri maupun swasta, tetapi belum memadai. Dengan dibayarkan kelebihan jam mengajar di sekolah negeri dan pemberian subsidi guru swasta belum menyentuh kebutuhan bagi guru-guru tersebut. Bagaimana guru dapat meningkatkan kualitasnya kalau penghasilannya rendah dan bagaimana guru dapat mengembangkan profesionalitasnya kalau kesejahteraannya tidak memadai. *Kelima*, direalisasikan pendidikan budi pekerti di sekolah dengan metode yang konkrit dan efektif. Tidak efektifnya pendidikan budi

pekerti, juga merupakan salah satu akibat dari kebijakan penyeragaman yang terlalu ketat. Sudah saatnya pendidikan budi pekerti direalisasi dengan mengaplikasikan metode yang konkrit dan efektif (Supriyoko, 2000:315).

KEBEBASAN AKADEMIK

Pendidikan dapat diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Pemerintah memberikan arahan bagaimana pelaksanaan pendidikan oleh sekolah negeri maupun sekolah swasta. Kontrol dan pengaruh yang bersifat indoktrinatif dari luar sekolah harus diminimalkan, sebaliknya ide *school based management* harus mulai dikembangkan. Sekolah sebagai unit terendah dalam hirarki organisasi pendidikan harus memiliki kemandirian. Oleh karena itu, sekolah harus melaksanakan kebebasan otonomi yang dimilikinya sejauh aktivitas sekolah tidak melanggar undang-undang dan peraturan yang ada. Artinya, *academic freedom* bukanlah kebebasan mutlak tanpa kendali. Misalnya pelarangan mengajarkan Marxisme di Indonesia tidak dapat diartikan bahwa di sekolah tidak ada kebebasan akademik. Perlunya kebebasan akademik guna mengembangkan prinsip demokrasi di sekolah yang bertumpu pada interaksi dan kerjasama, berdasarkan pada sikap saling menghormati dan memperhatikan satu sama lain, berpikir kreatif, menemukan solusi atas problem yang dihadapi bersama, dan bekerjasama untuk merencanakan dan melaksanakan solusi. Secara implisit hal ini berarti sekolah yang demokratis harus mendorong dan memberikan kesempatan semua siswa untuk aktif berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, merencanakan kegiatan dan melaksanakan rencana tersebut (Dewey, 1974). Kebebasan akademik juga menuntut bahwa sekolah tidak dapat dipisahkan dengan aktivitas politik. Hubungan politik dan pendidikan amat erat bahkan cenderung bersifat sosial alami. Depolitisasi dunia pendidikan memang dapat dilaksanakan dalam semua aspek pendidikan, tetapi tidak mungkin dilaksanakan untuk selamanya. Karena itu untuk melaksanakan pendidikan demokrasi perlu dikaji ulang kebijakan depolitisasi pendidikan, seperti guru sebagai anggota KORPRI tidak boleh berpolitik kecuali memilih Golkar, organisasi ekstra pelajar dilarang, mahasiswa tidak boleh berpolitik praktis, organisasi ekstra mahasiswa dilarang di kampus, dan sebagainya.

PENDIDIKAN KEBHINEKAAN

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk, yang terdiri dari beraneka suku bangsa, bahasa, agama, dan kebudayaan. Walaupun berane-

karagam mereka merupakan satu kesatuan. Bhineka Tunggal Ika merupakan manifestasi kemajemukan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk di dalamnya adalah kehidupan pendidikan. Kurikulum yang memuat pokok-pokok pengajaran dapat ditentukan secara nasional, namun penjabaran dan implementasi ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan di daerah, tergantung kondisi lapangan yang ada, baik menyangkut sosial, budaya, maupun sarana dan prasarana pendidikan. Pendidikan kebhinekaan menghargai dan mengakomodasikan perbedaan latar belakang seseorang yang menyangkut nilai, budaya, sosial, ekonomi, bahkan perbedaan dalam kemampuan. Realitas adanya berbagai latar belakang ini tidak mungkin dinisbikan dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, kebijakan yang bersifat standar yang berlaku seragam secara nasional, seperti Ebtanas, patut dipertanyakan. Sebab, setiap kebijakan yang bersifat nasional terstandar cenderung melecehkan prinsip-prinsip kebhinekaan dan tidak adil. Meskipun kehidupan kelompok dihargai dan diakomodir, namun pendidikan kebhinekaan lebih menekankan pada cita-cita yang tidak mengenal batas-batas kelompok seperti hak asasi manusia dan keadilan.

MATERI CIVICS

Sekolah pada jaman Orde Baru berupaya menciptakan bentuk perilaku politik tertentu, dengan mengimplementasikan kurikulum kewarganegaraan yang berdasar pada disiplin kaku dan bersifat indoktrinatif. Berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang diharapkan mendukung tercapainya tujuan terbentuknya perilaku politik tertentu telah pula dilaksanakan lewat berbagai upacara seremonial. Tetapi, sejarah telah menunjukkan bahwa tidak ada upaya indoktrinasi yang berhasil. Dalam pendidikan politik yang bersifat indoktrinatif, para siswa mengikuti kegiatan seremonial dalam bentuk berbagai upacara dengan penuh keterpaksaan. Pelajaran yang diterima di kelas tidak cocok dengan realitas yang ada dalam masyarakat. Pendidikan kewarganegaraan dipenuhi dengan doktrin dan berbagai informasi yang tidak diperlukan, yang harus dihafal tanpa memahami makna sebenarnya. Apabila siswa memahami doktrin yang dipelajari, maka akan diketemukan bahwa apa yang dipelajari berbeda dengan apa yang ada di masyarakat.

Dengan adanya reformasi dalam bidang pendidikan, sangat diperlukan reformasi pendidikan kewarganegaraan. Kurikulum pendidikan kewarganegaraan atau *civics* harus dirombak secara menyeluruh, bukan hanya dalam bentuk suplemen. Prinsip indoktrinasi harus diminimalkan dan diganti de-

ngan prinsip dialog. Aktivitas yang berbau paksaan harus diubah menjadi aktivitas dengan nuansa kesadaran. Tekanan pada prestasi dan kerja individual perlu dilengkapi dengan tekanan prestasi dan kerjasama kelompok. Materi *civics* ditekankan pada empat aspek yang meliputi aspek sejarah asal mula demokrasi dan perkembangannya, perkembangan demokrasi di Indonesia, jiwa demokrasi dalam Pancasila dan UUD 1945 setelah diamandemen, dan tantangan demokrasi dalam era globalisasi.

Pemerintah reformasi telah mengadakan serangkaian usaha untuk mengganti Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) menjadi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) atau *civic education* yang dapat memberikan pengalaman berdemokrasi. PKn yang menggantikan mata pelajaran PPKn diyakini bisa memberikan pengalaman berdemokrasi bagi peserta didik di sekolah. Karena itu, harus ada upaya mengembangkan model-model pembelajaran PKn dengan memperhatikan prinsip-prinsip keilmuan dan melalui praktek demokrasi secara langsung. Menurut Suryadi (2001), model yang digunakan dalam penerapan PKn yang dapat memberikan pengalaman terlibat secara langsung dalam proses berdemokrasi kepada peserta didik adalah pembelajaran berbasis portofolio. Bentuknya berupa dokumentasi dan tampilan yang melukiskan keseluruhan prosedur dan kegiatan serta hasil kerja siswa. Melalui pembelajaran demikian, peserta didik diajak untuk berpikir, mengumpulkan data dan menganalisisnya, serta mencari solusi atas persoalan-persoalan yang ada di wilayahnya. Setelah itu peserta didik diberi kesempatan mengemukakan pendapat, serta mengusulkan alternatif solusi kepada pejabat yang berwenang di wilayahnya. Kalau peserta didik dibawa pada praktik kehidupan sehari-hari maka lambat laun mereka akan memahami makna demokrasi dan mengalami prosesnya.

Ada empat prinsip yang harus dilakukan dalam penerapan PKn berbasis portofolio. *Pertama*, penerapan PKn bukan menjadi bagian indoktrinasi politik pemerintah, tetapi sebagai pendidikan intelektual. Kurikulum PKn tidak lagi mengajarkan nilai secara langsung dengan berbagai definisi, tetapi dilatih pemahamannya dan mempraktikkan nilai-nilai demokrasi. *Kedua*, PKn harus dapat mengembangkan *state of mind* atau kemampuan bernalar menggunakan logika, keterampilan untuk menggagas sesuatu, dan memahami berbagai masalah yang ada di sekitarnya. *Ketiga*, pembelajaran PKn harus menjadi proses pencerdasan dengan pendekatan yang lebih partisipatif. Selain itu, dengan berpikir menggunakan logikanya, peserta didik juga dilatih kepekaannya pada permasalahan yang ada di lingkungannya. *Keempat*, PKn harus menjadi laboratorium demokrasi sehingga dalam proses pembelajaran

yang dilakukan bukan *teaching* demokrasi, tetapi *doing* demokrasi. *Teaching* demokrasi hanya mengajarkan konsep-konsep demokrasi dan mengajarkan hafalan. Tetapi lewat *doing* demokrasi peserta didik dilatih untuk praktik langsung menggunakan nilai-nilai demokrasi dan terlibat dalam sebuah proses demokrasi.

Dalam jangka pendek upaya memperbaharui pendidikan kewarganegaraan akan menghadapi tantangan dari sisa-sisa Orde Baru yang masih memiliki kekuatan di dunia pendidikan. Sebab, sisa-sisa kekuatan Orde Baru sadar, terwujudnya kultur demokrasi di dunia pendidikan merupakan lonceng kematian bagi mereka. Salah satu wujud konkrit tantangan yang akan menghambat pendidikan demokrasi di Indonesia adalah keinginan dan perilaku penguasa Orde Reformasi untuk mempertahankan sistem sentralisasi dan birokrasi yang berlebihan dalam dunia pendidikan.

NILAI-NILAI DEMOKRASI

Revolusi demokrasi pecah hampir bersamaan waktunya dengan munculnya revolusi industri. Revolusi industri menimbulkan berbagai perubahan, baik dalam lingkup keluarga, hubungan kerja, kehidupan menjadi lebih individualistik, memerlukan tatanan sosial baru yang harus dikembangkan berdasarkan nilai-nilai demokrasi. Demikian pula, ada hubungan perubahan yang sistematis antara pelaksanaan demokrasi dan tingkat kemakmuran suatu bangsa. Semakin makmur suatu bangsa, semakin demokratis bangsa tersebut.

Timbulnya demokrasi dapat ditelusuri kembali pada jaman Yunani yang mencoba membentuk negara untuk menjawab pertanyaan bagaimana suatu sistem politik harus diorganisir sehingga bisa menyejahterakan warganya. Demokrasi modern timbul bersamaan meletusnya revolusi Perancis untuk membebaskan rakyat dari sistem politik otoriter, dengan semboyan: *li berte, egalite, fraternity* (Soetrisno, 1999:105). Semboyan tersebut kemudian menjadi sumber demokrasi yang menjalar ke berbagai penjuru dunia. Di Amerika sosok demokrasi menjadi lebih jelas dengan semboyan: *government of the people, by the people, and for the people*. Dan perkembangan selanjutnya, muncul berbagai variasi demokrasi yang menunjukkan bahwa demokrasi merupakan konsep universal tetapi tumbuh berkembang secara dinamis. Misalnya, demokrasi liberal, demokrasi sosialis, dan demokrasi terpimpin. Perkembangan tersebut justru semakin membingungkan konsep demokrasi itu sendiri. Karena itu yang penting bukan definisi demokrasi, tetapi kriteria apa saja untuk bisa mengklasifikasi suatu negara bisa disebut negara demokrasi.

Misalnya, Imawan (2001:54) menyebutkan klasifikasi negara demokrasi meliputi (1) warga negara secara bebas dan berkala memilih orang-orang yang mereka nilai layak dipercaya untuk memerintah; (2) orang yang memerintah dapat dipercaya dan bertanggung jawab langsung kepada orang yang diperintah; (3) ada mekanisme politik yang memungkinkan warga negara dapat mengontrol sejauh mana kepentingan mereka dilaksanakan oleh orang yang memerintah; dan (4) ada kesejajaran tawar-menawar politik antara warga negara dengan orang yang memerintah, sebagai jaminan terciptanya hubungan yang bersifat konsultatif.

Masyarakat demokratis dicirikan oleh kehidupan bersama di mana setiap warganya memiliki martabat sebagai manusia yang bebas. Martabat sebagai manusia bebas ini menyebabkan manusia berhak memiliki keyakinan dan pendirian yang tidak bisa diubah secara paksa oleh siapapun. Masyarakat demokratis akan memiliki pemerintahan yang demokratis pula. Pemerintahan demokratis akan bersandar pada kekuasaan yang bersumberkan kemampuan dan pengetahuan warga masyarakatnya. Oleh karena itu, setiap pemerintahan demokratis akan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi warganya untuk memperoleh pendidikan. Sebab, semakin banyaknya warga yang memperoleh pendidikan dan semakin tinggi tingkat pendidikan yang diperoleh, semakin kuat pemerintahan demokrasi. Hal ini bertolak belakang dengan pemerintahan diktator yang akan terancam oleh warganya yang berpendidikan. Pemimpin pemerintahan yang demokratis berasal dari masyarakat luas, bukan dari kelompok tertentu yang sudah memiliki pengaruh dan terkenal. Apabila pemimpin hanya berasal dari kelompok tertentu baik karena kekayaannya atau karena ketenarannya, dan melecehkan calon pemimpin yang datang dari masyarakat kebanyakan, maka masyarakat akan terpisah secara permanen ke dalam dua kelompok yaitu kaya dan miskin. Mobilitas pada masyarakat dan pemerintahan demokratis sangat tinggi, sehingga memungkinkan setiap anak memiliki kesempatan mengembangkan potensinya semaksimal mungkin, dan masyarakat akan mendapatkan manfaat dari perkembangan sumber daya insani tersebut (Zamroni, 2001:29).

Dalam masyarakat demokratis muncul kesadaran bahwa kekuasaan akan aman kalau berada di tangan rakyat sendiri. Oleh karena kekuasaan ada di tangan rakyat sendiri, maka kekeliruan atau kekurangan akan diperbaiki lewat pendidikan atau keterbukaan komunikasi, bukan digulingkan. Di samping itu, pada masyarakat demokratis muncul pula kesadaran bahwa untuk memegang dan melaksanakan tugas-tugas tertentu hanya dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan tertentu. Dan dalam banyak hal

jabatan dan tugas-tugas tertentu tersebut akan mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah. Masyarakat merelakan itu semua asal kebijaksanaan tersebut tidak mencabut kebebasan, otonomi dan martabatnya.

Ide pokok demokrasi adalah pandangan hidup tentang perlunya partisipasi dari setiap warga yang sudah dewasa dalam membentuk nilai-nilai yang mengatur kehidupan bersama. Demokrasi merupakan suatu keyakinan, suatu prinsip pertama dan paling utama yang harus dijabarkan dan dilaksanakan secara sistematis dalam bentuk aturan sosial politik (Dewey, 1974:50). Dengan demikian demokrasi menyangkut suatu bentuk pemerintahan dan yang utama adalah suatu bentuk kehidupan bersama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kehidupan bersama yang berlandaskan demokrasi tersebut memerlukan (1) suatu visi dan kode etik yang dijabarkan secara formal dalam hukum atau undang-undang yang harus dipatuhi oleh warga; (2) sistem hukum yang objektif dan mandiri; (3) sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat; (4) struktur sosial, politik dan ekonomi yang menjauhi monopoli dan memungkinkan terjadinya mobilitas yang tinggi dan kesempatan yang adil bagi semua warga; (5) kebebasan berpendapat agar ide-ide warga masyarakat dapat diserap oleh pemerintah; dan (6) kebebasan menentukan pilihan pribadi.

Masyarakat demokrasi akan tumbuh kokoh jika di kalangan masyarakat tumbuh kultur dan nilai-nilai demokrasi antara lain toleransi, bebas mengemukakan dan menghormati perbedaan pendapat, memahami keanekaragaman dalam bermasyarakat, terbuka dalam berkomunikasi, menjunjung nilai dan martabat kemanusiaan, percaya diri atau tidak menggantungkan diri pada orang lain, saling mengharai, mampu mengekang diri, kebersamaan, dan keseimbangan.

SOSIALISASI NILAI-NILAI DEMOKRASI

Pendidikan adalah proses yang berkaitan dengan upaya mengembangkan diri seseorang pada tiga aspek yaitu pandangan hidup, sikap hidup, dan keterampilan hidup. Upaya mengembangkan ketiga aspek tersebut bisa dilaksanakan dengan bentuk formal dan nonformal. Melalui bentuk formal berarti upaya tersebut dilaksanakan melalui sistem pendidikan yang diwujudkan dalam serangkaian kegiatan yang dirancang secara sistematis dan dirumuskan dalam suatu kurikulum tertentu, dan disertai persyaratan yang ketat untuk melaksanakan proses tersebut. Dengan mendasarkan konsep pendidikan tersebut, sesungguhnya pendidikan merupakan proses pembudayaan atau *enculturation*,

suatu proses untuk mentasbihkan seseorang mampu hidup dalam suatu budaya tertentu. Dalam proses politik, pendidikan sistem persekolahan mempunyai peran yang penting khususnya untuk kelangsungan sistem politik yang ada. Peranan pendidikan antara lain sebagai sosialisasi kultur politik di kalangan peserta didik, seleksi, rekrutmen dan melatih calon pemimpin politik, dan integrasi bangsa.

Suatu sistem politik akan bisa langgeng jika mendapatkan dukungan dari warga masyarakat. Setiap penguasa yang memiliki sistem politik apapun, perlu melaksanakan sosialisasi politik, khususnya di kalangan remaja. Tujuannya adalah agar mereka memiliki pengetahuan politik, kesadaran politik, nilai, sikap dan orientasi politik, dan mampu berpartisipasi dalam politik, sehingga aktif memberikan dukungan dan kelak bisa melanggengkan sistem politik yang dianut selama ini. Tanpa adanya keberhasilan dalam sosialisasi politik akan muncul gejolak politik yang berkepanjangan yang merupakan pencerminan tidak adanya dukungan warga masyarakat terhadap sistem politik yang ada, yang akan membawa akibat sistem politik runtuh atau diganti. Oleh karena itu, setiap pemerintahan demokratis akan melaksanakan sosialisasi nilai-nilai demokratis di kalangan generasi muda, dan dapat dilakukan antara lain melalui sistem persekolahan. Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis proses sosialisasi pada sistem persekolahan adalah melihat bagaimana proses sosialisasi nilai-nilai demokrasi yang berlangsung di sekolah.

Pada banyak negara dewasa ini dominasi politik pada lembaga pendidikan semakin kuat. Hal ini dicerminkan pada kecenderungan pergeseran fungsi sekolah sebagai media sosialisasi nilai ke arah media indoktrinasi nilai-nilai. Berbeda dengan proses sosialisasi yang menekankan pada proses dan penghayatan nilai, maka indoktrinasi menekankan pada pentingnya hasil proses tersebut.

Semakin dominannya pengaruh lembaga politik terhadap lembaga pendidikan dapat juga ditunjukkan dengan adanya kecenderungan pendidikan ke arah sistem yang bersifat sentralistik. Hal ini dapat dilihat dengan semakin berkembangnya birokrasi untuk menopang proses pengajaran tradisional yang semuanya mengarah pada rigiditas. Birokrasi pusat cenderung menekankan proses pendidikan secara klasikal dan bersifat mekanistik. Akibatnya pihak-pihak terkait dalam pendidikan, khususnya guru dan murid sebagai individu yang memiliki kepribadian tidak banyak mendapatkan perhatian.

Kurikulum, guru, aturan dan prosedur pelaksanaan pengajaran di sekolah dan juga di kelas di tentukan dari pusat dengan segala wewenangnya. Lebih

lanjut, sentralisasi dan berkembangnya birokrasi pendidikan yang semakin luas dan kaku akan menjadikan keseragaman sebagai suatu tujuan. Hasilnya, berkembanglah manusia dengan mentalitas Juklak dan Juknis yang siap diberlakukan secara seragam. Akibat lebih jauh di masyarakat akan berkembang budaya hati-hati dan persetujuan merupakan kunci sukses dan promosi. Komunikasi berarti komando. Interaksi dicampuradukkan dengan pertemuan resmi. Dan stabilitas dikaitkan dengan tindak yang tidak mengandung emosi. Hal ini merupakan suatu ironi dalam proses sosialisasi nilai-nilai demokrasi. Lembaga yang melaksanakan proses sosialisasi nilai-nilai demokrasi, justru pada dirinya sendiri adalah tidak demokratis.

Di samping tekanan dari lingkungan politik, dunia pendidikan juga mendapatkan tekanan yang berlebihan dari lingkungan ekonomi, dengan menempatkan dunia sekolah, sebagai instrumen dalam pembangunan, khususnya untuk menyediakan tenaga kerja. Akhirnya iklim yang ditanamkan di dunia sekolah adalah upaya untuk mendapatkan pekerjaan yang baik dengan gaji yang besar. Di samping itu tekanan kemiskinan menimbulkan obsesi generasi muda bahwa kekayaan merupakan obat yang harus segera diperoleh dengan segala cara dan dengan biaya apapun juga. Tujuan segala kegiatan adalah kekayaan, dan yang lainnya merupakan variabel instrumental untuk mencapai kekayaan tersebut. Dengan demikian pendidikan politik, bahkan juga agama, bisa diperlakukan sebagai sarana dan alat untuk mendapatkan kekayaan. Pendidikan secara khusus akan diperlakukan sebagai lembaga yang mencetak tenaga kerja, bukan lembaga yang menghasilkan manusia yang utuh. Konsep tersebut akan menimbulkan tekanan yang berlebihan pada hasil tanpa menikmati prosesnya. Sekolah dijalani oleh seseorang agar mendapatkan ijazah untuk bekerja. Proses sekolahnya sendiri tidak pernah dinikmati, karena tidak penting.

Akibat dari mentalitas sekolah semacam itu adalah muncul generasi terdidik yang bersifat materialistik, individualistik dan konsumtif, serta memiliki mentalitas yang suka menerabas, yakni semangat dan kemauan untuk mendapatkan sesuatu tersebut secepat mungkin dengan cara yang ringan, seperti menyotek, mencari bocoran soal ujian, dan sebagainya (Koentjaraningrat, 1974:51). Aspek lain yang muncul di dunia sekolah adalah teras semakin dominannya nilai ekstrinsik di kalangan peserta didik. Sudah tentu kondisi semacam ini melawan arus untuk terlaksananya sosialisasi nilai-nilai demokrasi di kalangan pelajar.

PENUTUP

Pendidikan adalah unsur vital dalam setiap masyarakat, terutama masyarakat demokratis. Sasaran pendidikan demokratis adalah menghasilkan warga negara yang bebas, mau bertanya, memiliki pandangan analisis, dan memahami ajaran dan praktek demokrasi. Tugas pendidikan adalah mempersiapkan manusia demokratis, dan menyelenggarakan pendidikan secara demokratis yang memungkinkan peserta didik mengembangkan pemahaman atas masyarakat pluralistik dan mampu berpartisipasi aktif dalam kerjasama, toleransi, mengambil keputusan secara rasional, memahami setiap persoalan dari berbagai pandangan yang berbeda, dan mensosialisaikan nilai-nilai demokrasi. Persoalan yang dihadapi dunia pendidikan adalah bagaimana menciptakan sekolah sebagai lembaga yang demokratis sehingga dapat menghasilkan lulusan yang juga demokratis. Keberadaan sekolah yang demokratis amat penting bagi bangsa Indonesia. Kehidupan yang bersifat plural sebagaimana masyarakat Indonesia, menuntut pemahaman akan masyarakat plural di kalangan warga masyarakat sendiri. Pemahaman tersebut akan tercermin dalam perilaku kehidupan warga masyarakat, sehingga melahirkan toleransi dan kebersamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemahaman akan makna pluralis terkait erat dengan suasana dan kultur yang demokratis, yang pada gilirannya sangat terkait dengan kecerdasan masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Dewey, J. 1974. *On Education*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Imawan, R. 2001. Masyarakat Madani dan Agenda Demokratisasi. Dalam Arif Subhan (Ed.). *Indonesia Dalam Transisi Menuju Demokrasi* (hlm. 52-65). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Koentjaraningrat, 1974. *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- Kompas. 2001, 20 Oktober. *PKn Gaya Baru Bisa Berikan Pengalaman Berdemokrasi*. Hlm .9.
- Soetrisno, L. 1999. *Jalan Kemanusiaan, Panduan untuk memperkuat Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Supriyoko. 2000. Reformasi Sistem Pendidikan Menuju Masyarakat Madani. Dalam Widodo Usaman (Ed.). *Membongkar Mitos Masyarakat Madani*. (hlm. 312-325). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zamroni. 2001. *Pendidikan Untuk Demokrasi, Tantangan Menuju Civil Society*. Yogyakarta: Bigraf.